

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi ekonomi dalam suatu negara merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Tidak heran, jika pemerintah dari setiap negara berupaya memperbaiki tatanan ekonomi demi kekokohan negara sekaligus meningkatkan derajat negaranya di mata dunia internasional. Pemerintah tentu tidak dapat menjalankan perekonomian negara tanpa bantuan dari rakyatnya, untuk itu kontribusi masyarakat juga sangat menentukan dalam perekonomian suatu negara, termasuk negara Indonesia. Di negara Indonesia, ada tiga pelaku ekonomi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi.

Koperasi yang termasuk bagian dari salah satu pelaku ekonomi tersebut, dipandang sebagai kekuatan ekonomi yang tumbuh di kalangan masyarakat sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi seperti yang dikemukakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 33 dan penjelasannya adalah sebagai berikut: **“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.”** Hal tersebut mencerminkan bahwa dalam organisasi koperasi menjunjung tinggi asas gotong royong untuk mensejahterakan masyarakat.

Tujuan koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kesejahteraan anggota akan tercapai bila anggota mendapatkan manfaat ekonomi dari koperasi. Dengan demikian tugas pokok koperasi adalah memberikan kesejahteraan ekonomi anggota untuk menuju kepada keadaan ekonomi yang lebih baik dengan indikator terjadinya peningkatan pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ramudi Ariffin (2010:17) **“Tujuan ekonomi koperasi dapat dioperasionalkan sebagai meningkatkan pendapatan anggota. Bila koperasi berhasil meningkatkan pendapatan anggota maka kesejahteraan (ekonomi) anggota akan meningkat”**. Tetapi, pendapatan perlu terlebih dahulu dikategorikan ke dalam pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan Nominal yaitu pendapatan dalam jumlah uang dan pendapatan riil yaitu pendapatan dalam jumlah dan jenis barang/jasa yang dapat dibeli dengan pendapatan nominalnya. Dengan demikian dikarenakan KPKB merupakan Koperasi Konsumen, maka tujuan koperasi adalah berupaya untuk meningkatkan daya beli anggota (meningkatkan pendapatan riil anggota).

Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) merupakan koperasi yang berdiri berdasarkan kesamaan anggotanya yaitu Pegawai Negeri Kota Bandung pada awalnya bernama Koperasi Pegawai Otonom Kota Praja yang disingkat KPOKP. Badan hukum paling akhir No. 518/PAD-02-DISKOP/2005. Beralamat di Jl. Wastukencana No.5 Bandung. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) memiliki 2 (dua) unit usaha, yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam dan Unit Usaha Perniagaan. Dalam menjalankan unit usahanya, KPKB

memerlukan modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional koperasi. Modal pada koperasi dapat diperoleh dari dalam maupun dari luar koperasi, di mana hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab VII pasal 41 menyatakan bahwa modal koperasi bersumber dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya.

Analisis laporan keuangan yang digunakan untuk melihat sejauh mana koperasi mampu menghasilkan keuntungan dari segala aktivitas usaha yang dijalankannya. Maka salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas koperasi yaitu *Return On Equity* (ROE). Menurut Kasmir (2013:204) “*Return On Equity* atau disebut juga sebagai rentabilitas modal sendiri merupakan rasio yang membandingkan laba bersih sesudah pajak dengan jumlah modal sendiri”. Untuk mengetahui kondisi *Return On Equity* yang dimiliki Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Perkembangan Return On Equity (ROE) KPKB Tahun 2014-2018

Sumber : Laporan RAT KPKB data yang diolah

Berdasarkan Gambar 1.1 *Return On Equity* KPKB mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2018 *Return On Equity* KPKB sebesar 1,20%. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Prestasi Mengenai *Return On Equity* KPKB tidak baik karena berada di bawah 3%, *Return On Equity* dapat dikatakan sangat baik apabila memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 21%.

Struktur modal merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi perusahaan karena aktivitas yang akan dijalankan perusahaan diawali dengan adanya pembentukan modal. Menurut Ircham *et al* (2014) dalam Rita Rolita menyatakan :

“Struktur modal dalam perhitungan *debt to total asset ratio* merupakan rasio utang terhadap aset yang digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana atau modal yang disediakan oleh kreditur. Kegunaan rasio ini secara spesifik adalah untuk mengukur seberapa besar investasi aktiva dibiayai dengan total hutang”.

Adapun struktur modal pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2014-2018 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan Struktur Modal (DAR) KPKB Tahun 2014-2018

<i>Debt To Total Asset Ratio</i>			
Tahun	Total Hutang (Rp)	Total Aktiva (Rp)	DAR (%)
2014	15.782.242.513,41	57.588.315.138,66	27,41
2015	16.481.364.959,73	64.180.744.389,91	25,68
2016	17.329.870.834,39	68.728.030.217,22	25,22
2017	23.221.006.208,57	78.591.906.095,84	29,55
2018	25.446.158.314,18	84.022.288.250,54	30,29

Sumber : Laporan RAT KPKB Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut mengalami fluktuatif, Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia

No.06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Prestasi Mengenai nilai dari struktur modal selama lima tahun berada di bawah 40% hal ini menunjukkan bahwa struktur modal (DAR) berada dalam kondisi sangat baik. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. DAR yang rendah menunjukkan bahwa dana perusahaan sedikit dibiayai oleh hutang, hal ini dapat mempengaruhi keuntungan koperasi yang nantinya akan berdampak kepada manfaat ekonomi bagi anggota.

Manfaat ekonomi bagi anggota terbagi menjadi dua yaitu manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung. Manfaat ekonomi langsung yaitu manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh anggota yaitu berupa harga dan bunga yang ditetapkan oleh koperasi, sedangkan manfaat ekonomi tidak langsung yaitu berupa sisa hasil usaha yang diterima sesuai dengan transaksi yang diberikan.

Penelitian sebelumnya yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian Selma Ardiany Rhma, Darminto dan Topowijoyo (2018) dengan judul “Analisis Penetapan Struktur Modal yang Optimal Guna Meningkatkan Nilai Perusahaan”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu analisis struktur modal yang sudah ditetapkan oleh PT. Seemount Garden Sejahtera pada tiga tahun terakhir yaitu 2011-2013 dan menetapkan struktur modal yang dapat meningkatkan perusahaan pada tahun 2013, kebijakan manajemen dalam menetapkan struktur modal pada tahun 2011-2013 adalah lebih banyak menggunakan modal sendiri meskipun jumlah hutang semakin meningkat.

Penelitian lain dilakukan oleh Resi Yanuesti Violita dan Sri Sulasmiyati (2017) dengan judul “Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas pada perusahaan *Food and Beverages* yang terdapat di BEI Tahun 2013-2016”, menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Irchan, Siti Ragil Handayani, Muhammad Saifi (2014) dengan judul “Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham”, menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang diproksikan melalui ROE serta struktur modal yang diproksikan melalui DAR secara simultan memiliki pengaruh signifikan. Dari uraian di atas maka penulis tertarik mengambil judul **Analisis Struktur Modal, Biaya Modal Kaitannya Dengan *Return On Equity* (ROE) dan Manfaat Ekonomi Bagi Anggota**”. Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Struktur Modal pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Biaya Modal pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana Keterkaitan Struktur Modal dengan Biaya Modal (*Cost of Capital*) pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
4. Bagaimana Keterkaitan Struktur Modal dengan *Return on Equity* (ROE) pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

5. Bagaimana Keterkaitan Biaya Modal (*Cost of Capital*) dengan *Return on Equity* (ROE) pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
6. Bagaimana Keterkaitan Struktur Modal, Biaya Modal (*Cost of Capital*), *Return on Equity* (ROE) dengan Manfaat Ekonomi Bagi Anggota pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini di maksudkan untuk mendeskripsikan secara menyeluruh tentang Struktur Modal, Biaya Modal dan Kaitannya dengan *Return on Equity* (ROE) dan Manfaat Ekonomi Anggota pada “Koperasi Pegawai Kota Bandung”.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Perkembangan Struktur Modal pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
2. Perhitungan Biaya Modal pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
3. Keterkaitan Struktur Modal dengan Biaya Modal (*Cost of Capital*) pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
4. Keterkaitan Struktur Modal dengan *Return on Equity* (ROE) pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
5. Keterkaitan Biaya Modal (*Cost of Capital*) dengan *Return on Equity* (ROE) pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

6. Keterkaitan Struktur Modal, Biaya Modal (*Cost of Capital*), *Return on Equity* (ROE) dengan Manfaat Ekonomi Bagi Anggota pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat dijadikan pedoman dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini serta dapat dijadikan sumber informasi, referensi dan sumbangan pikiran bagi penelitian selanjutnya yang sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Koperasi Pemerintah Kota Bandung (KPKB), yaitu dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi kegiatan usaha koperasi agar dapat memberikan manfaat lebih bagi anggota serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan struktur modal, biaya modal dan kaitannya dengan *Return on Equity* (ROE) dan manfaat ekonomi bagi anggota.

IKOPIN